



RANCANGAN AKHIR **(R E N J A)** ***TAHUN* 2025**

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KOTA PANGKALPINANG



KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan.

Bahwa berdasarkan Pasal 142 dan Pasal 143 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, penetapan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2024. Mendasari ketentuan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja ini sesungguhnya telah mencerminkan komitmen membangun daerah dalam tataran partisipatif, sinkronisasi, dan keberpihakan *stakeholders* terhadap pembangunan Kota Pangkalpinang.

Renja awal Tahun 2025 disusun dengan mempedomani target pada Renstra, RKPD, RPJMD dan Prioritas Program Pembangunan Daerah. Atas tersusunnya rancangan akhir Rencana Kerja Tahun 2025 ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak atas peran dan masukannya. Semoga Rencana Kerja ini dapat bermanfaat bagi kita semua dalam bekerja serta dalam membangun Kota Pangkalpinang.

**KEPALA PELAKSANA HARIAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA HARIAN
KOTA PANGKALPINANG**



**DEDY REVANDI, SH, MH
PEMBINA/IVa
NIP. 197609192002121005**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang berada dalam wilayah Kota Pangkalpinang. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang juga Menyusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai dokumen perencanaan pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun kedepan dan memuat rancangan program dan prioritas kegiatan serta rencana pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah/Anggaran Pendapatan Belanja Negara.

Pada Rancangan Akhir Rencana Kerja Tahun 2025 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang menyusun rencana guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dengan demikian Rancangan Akhir Rencana Kerja merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Dimana kebijakan umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah ditetapkan secara Bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, Rencana kerja mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku Pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik, sebagai berikut:

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah karena memuat arah kebijakan Pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah Daerah.

Proses penyusunan Rencana Kerja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tahunan, serta RPD kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 dilaksanakan sebagai pedoman dan penyambung atas implementasi periode terakhir RPJPD Kota Pangkalpinang. Lebih lanjut penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah dan Rencana kerja Organisasi Perangkat Daerah juga diintegrasikan dengan prioritas Pembangunan Pemerintah Daerah, Provinsi maupun Pemerintah Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antara pelaku Pembangunan, tentang Rancangan Akhir Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah, yang menitik beratkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah serta Masyarakat dalam pencapaian tujuan Pembangunan Kota Pangkalpinang.

Rancangan Akhir Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 disusun untuk memberikan arah dalam perencanaan guna memberikan pelayanan kepada masyarakat. Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan langsung dengan Masyarakat utamanya yang berkaitan dengan penanggulangan bencana, karena pelayanan kepada masyarakat merupakan tujuan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Rancangan akhir Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025, adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4723);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4629);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan PP Nomor 18 tahun 2016 Tentang perangkat daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang pedoman Organisasi dan Tata Kerja Penanggulangan Bencana Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

- Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 2);
 16. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 57) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 05 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2020 Nomor 05);
 17. Peraturan WaliKota Pangkalpinang Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota No. 39 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang tahun 2021 (Berita Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2021 Nomor 32) tanggal 6 Agustus 2021.
 18. Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 08 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007-2026 (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2007 Nomor 04 Seri E);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rancangan Rencana kerja ini adalah untuk memenuhi Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rancangan kegiatan dan anggaran (RKA) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota

Pangkalpinang tahun 2025. Rancangan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2025 ini dimaksudkan juga sebagai pedoman untuk melaksanakan Program, Kegiatan maupun Sub Kegiatan yang sangat penting dan menunjang untuk dilaksanakan hingga akhir (Desember) pada tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rancangan Rencana Kerja ini adalah terwujudnya Dokumen Rencana Kerja Awal Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perencanaan Pembangunan Daerah dan untuk memasukkan Program, Kegiatan, Sub Kegiatan yang ada untuk direncanakan dalam Kebijakan Umum Anggaran - Prioritas dan Plapon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) .

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BPBD
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah BPBD
- 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi BPBD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

- 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan Capaian Renstra BPBD

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan tahun lalu ditujukan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra Perangkat Daerah, serta hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja sampai dengan tahun lalu dan capaian Renstra Perangkat Daerah (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) dapat dilihat pada tabel 2.1 dibawah ini (terlampir).

TABEL 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP KABUPATEN/KOTA
RENJA PERANGKAT DAERAH BPBD KOTA PANGKALPINANG
TAHUN ANGGARAN 2024

No.	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024			
			Kelompok Sasaran	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5		
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				Rp 4.092.340.690	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			100%	Rp 7.500.600	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	dokumen	2 Dokumen	Rp 3.862.300	

	koordinasi dan penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	laporan	2 Laporan	Rp 1.722.000	
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan	1 Laporan	Rp 1.915.900	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			100%	Rp 3.328.888.614	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan	ASN	25 orang	Rp 3.324.829.614	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan /Smesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD dan laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Smesteran SKPD	laporan	1 Laporan	Rp 4.059.000	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			100%	Rp 223.309.000	
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	pegawai	2 paket	Rp 198.309.000	
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	ASN	9 Orang	Rp 25.000.00	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah			100%	Rp 176.411.900	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	komponen listrik	1 paket	Rp 4.419.600	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Peralatan dan perlengkapan	1 paket	Rp 44.959.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	jumlah jenis bahan logistik yang di sediakan	Logistik	2 paket	Rp 14.874.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah barang cetak dan penggandaan yang disediakan	Cetak, Penggandaan	2 paket	Rp 12.159.300	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah koordinasi dan konsultasi yang dilakukan	pegawai	4 laporan	Rp 100.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			100%	Rp 14.583.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	unit	10 unit	Rp 14.583.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 269.564.976	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	pegawai	4 laporan	Rp 87.000.000	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang diperbaiki	Peralatan, Perlengkapan Kantor	4 laporan	Rp 21.609.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah aparatur internal SKPD yang terlayani	PHL	4 laporan	Rp 160.995.976	

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			100%	Rp 130.707.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas/kendaraan dinas jabatan yang dipelihara	Kendaraan	1 unit	Rp 26.959.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara	Kendaraan	6 unit	Rp 86.789.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Peralatan	9 unit	Rp 16.959.000	
	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA					
2					Rp 4.180.952.684	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	Rp 174.459.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	warga negara	6.000 orang	Rp 174.459.000	

	Pelayanan Pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana		500 orang		Rp 383.784.800	
	pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen sistem dasar penanggulangan bencana yang tersusun	jumlah personil TRC yang dikembangkan kapasitas teknis dan Manajerialnya	106 orang	Rp 62.159.500	
	penyusunan rencana penanggulangan bencana kabupaten/kota	jumlah dokumen rencana penanggulangan bencana (RPB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal	warga negara	1 Dokumen	Rp 225.765.000	
	Penyediaan peralatan perlindungan dan kesiapsiagaan terhadap bencana kabupaten/kota	Jumlah Peralatan penyelamatan diri bagi individu warga negara keluarga maupun petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya	warga negara	2000 unit	Rp 47.336.000	
	Pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan dikawasan rawan bencana kabupaten/kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana	warga negara	50 orang	Rp 48.524.300	

	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam			Rp 3.492.710.984	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi	warga negara	650 orang	Rp 3.224.669.584	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	400 orang	Rp 268.041.400	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun			Rp 129.997.900	
	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	1 Dokumen	Rp 33.893.900	

	kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	1 Dokumen	Rp 5.005.000	
	pengelolaan dan pemanfaatan sistem informasi kebencanaan	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	1 Dokumen	Rp 70.312.000	
	pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penanggulangan bencana	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang tersusun jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	1 laporan	Rp 20.787.000	
	TOTAL				Rp 8.273.293.374	

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah analisis terhadap capaian kinerja serta mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi untuk Menyusun program dan kegiatan dalam rangka peningkatan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 63 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unsur Penunjang Perangkat Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai tugas membantu walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan sub bidang bencana yang menjadi kewenangan daerah.

Berdasarkan peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan perangkat Daerah Kota Pangkalpinang (Lembaran Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2016 Nomor 18) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang mempunyai struktur sebagai berikut:

1. Kepala Badan
2. Unsur Pengarah
3. Unsur Pelaksana/Kepala Pelaksana
4. Sekretaris, membawahi 2 subbagian yaitu:
 - a. Sub bagian umum dan kepegawaian
 - b. Sub bagian perencanaan, evaluasi pelaporan dan keuangan
5. Bidang Pencegahan, Kesiapsiagaan dan Kedaruratan membawahi 3 seksi yaitu:
 - a. Seksi pencegahan
 - b. Seksi kesiapsiagaan
 - c. Seksi kedaruratan
6. Bidang Rekontruksi, Rehabilitasi dan Logistik membawahi 3 seksi yaitu:
 - a. Seksi rekontruksi
 - b. Seksi rehabilitasi
 - c. Seksi logistik

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

2.3.1. Tingkat Kinerja Pelayanan OPD dan Hal Kritis Yang Terkait dengan Pelayanan OPD

Kota Pangkalpinang berdasarkan data yang ada mempunyai 6 potensi bencana alam berupa: kebakaran hutan dan lahan, banjir, genangan air, angin puting beliung, kekeringan dan longsor. Walaupun Kota Pangkalpinang adalah daerah yang terbilang aman bencana, namun Badan Penanggulangan Bencana Daerah tetap memberikan pelayanan terutama menyangkut Standar Pelayanan Minimal dalam penanggulangan bencana.

Karakteristik satu jenis bencana berbeda dengan bencana yang lain sehingga penanganannya berbeda. Selain itu bencana merupakan hal yang rumit dan tidak dapat diprediksi dengan pasti. Upaya tersebut akan dijabarkan dalam pemberian layanan kepada masyarakat diantaranya dengan pelayanan informasi rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. Pelayanan tersebut akan didukung dengan penataan sistem dasar penanggulangan bencana.

Sehingga diharapkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, mampu meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat dan meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.

2.3.2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan Tugas dan Fungsi OPD

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang merupakan OPD yang menjalankan fungsi penanggulangan bencana. Berbagai permasalahan yang masih dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah kota Pangkalpinang antara lain:

a. Dalam aspek Kelembagaan

Secara organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang kurang selaras dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri No.46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Hal ini menjadikan tugas pokok

dan fungsi yang dijalankan kurang maksimal sesuai amanat undang-undang yang mempengaruhi kinerja institusi.

b. Dalam aspek Ketugasan

- 1) Perlunya peningkatan kompetensi petugas (sumber daya manusia) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, dalam upaya memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.
- 2) Belum adanya Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana, yang menjadi dokumen penting.
- 3) Masih kurangnya informasi kepada Masyarakat tentang kebencanaan.
- 4) Perlunya pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana kepada Masyarakat, maupun petugas.
- 5) Belum tersedianya data-data yang akuntabel, maupun informasi yang dapat dihimpun secara akurat ssebagai bahan maupun acuan untuk mengevaluasi, maupun menentukan strategi atau pun kebijakan terkait dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang.

Isu penting yang menjadi perhatian Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang diantaranya sebagai berikut :

- a. Perlunya peningkatan layanan informasi rawan bencana kepada masyarakat, dengan harapan seluruh masyarakat mengetahui informasi terkait kebencanaan;
- b. Perlunya penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana.
- c. Perlunya respon cepat bencana non alam epidemi/wabah penyakit, dengan mendukung kebijakan yang diambil Pemerintah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2024 tanggal 2 Juli 2014. Badan Nasional Penanggulangan Bencana dalam rencana strategis Transisi tahun 2024-2026 memfokuskan penyelenggaraan penanggulangan bencana secara nasional di Indonesia ialah melalui Penguatan Mitigasi Bencana dan Peningkatan Ketahanan Bencana melalui Penguatan Sistem Peringatan dini multi ancaman bencana terpadu, sedangkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam rencananya memfokuskan pada kegiatan membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Sasaran yang akan dicapai BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung antara lain :

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana,
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana.
3. Terpulihkannya sarana dan prasarana, sosial, ekonomi dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak pasca bencana.
4. Meningkatnya kualitas tata Kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Berdasarkan hasil telaahan BNPB dan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui focus penyelenggaraannya masing-masing, maka terdapat irisan yang merupakan keselarasan antara fokus penyelenggaraan penanggulangan bencana yang akan dilaksanakan oleh BPBD Kota Pangkalpinang dengan BPBD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung maupun BNPB dan Kementerian Dalam Negeri di Tingkat pusat, yang pada akhirnya menjadi faktor pendorong pelaksanaan program/kegiatan oleh BPBD Kota Pangkalpinang.

Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sub-urusan bencana menjadi kewajiban pemerintah kota untuk mencapainya, namun tanpa bantuan pemerintah pusat terkait pendanaan, maka pemerintah kabupaten/kota akan

kesulitan untuk memenuhinya. Kondisi inilah yang kemungkinan merupakan faktor penghambat pencapaian SPM yang menjadi tugas BPBD kabupaten/Kota dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang salah satunya mengatur tentang pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yaitu urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat yang terdiri atas:

- a. Pelayanan informasi rawan bencana;
- b. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- c. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan kebencanaan tersebut diatas wajib diselenggarakan oleh pemerintah bagi Masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana, yang sudah ditentukan mengenai target/sasaran serta indikatornya.

Dalam rangka mewujudkan visi ini maka misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana adalah:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana.
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Sebagai penjabaran dari Visi dan Misi Badan Nasional Penanggulangan Bencana, maka tujuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang ingin dicapai yaitu:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.
2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.

4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua, yaitu:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia;
2. Struktur ekonomi yang produktif, Mandiri, dan berdaya saing;
3. Pembangunan yang merata dan Berkeadilan;
4. Mencapai Lingkungan hidup yang berkelanjutan;
5. Kemajuan Budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga.
8. Pengelolaan Pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya;
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045, kelima arahan tersebut mencakup:

1. Pembangunan sumber daya manusia.

Membangun sumber daya manusia pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2. Pembangunan Infrastruktur.

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3. Penyederhanaan Regulasi.

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan Omnibus Law, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan yang kedua Undang-Undang pemberdayaan UMKM.

4. Penyederhanaan Birokrasi.

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi.

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Telaahan terhadap kebijakan nasional yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi OPD. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional.

Berdasarkan RPD Kota Pangkalpinang tahun 2024-2026 Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPD. Maka Organisasi Perangkat Daerah menyusun Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada RPD 2024-2026. Pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.2.1. Tujuan

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut.

Tujuan yang ingin dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang adalah Mengefektifitaskan tingkat waktu tanggap (respon time rate) penanggulangan bencana.

3.2.2. Sasaran

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* program Perangkat Daerah. Tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah beserta indikator kinerjanya disajikan dalam Tabel 3.1 sebagaimana berikut ini:

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang

Tujuan / Sasaran / Program Perangkat Daerah	Indikator Tujuan / Sasaran	Formula / Rumus Indikator	Satuan	Capaian Indikator kinerja		Target Indikator Kinerja		
				2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatkan keberdayaan dan ketahanan masyarakat dalam menghadapi risiko bencana	Indeks Resiko Bencana		Nilai	120,40	120,40	120,40	120,40	120,40
Mengefektivitaskan tingkat waktu tanggap (<i>respon time rate</i>) penanggulangan bencana	Rata-rata Tingkat waktu Tanggap (<i>respon time rate</i>) Penanganan Bencana Alam	Jumlah korban bencana alam yang tertangani dalam waktu maksimal 1x24 jam / Jumlah korban keseluruhan bencana x 100%	%	100	100	100	100	100
	Persentase Dampak Bencana yang Ditangani dengan Baik	Jumlah bencana yang tertanganni tahun berkenaan / jumlah bencana yang terjadi tahun berkenaan x 100%	%	100	100	100	100	100

TABEL 3.2
RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2025

No.	Urusan Pemerintah Daerah/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			
			Kelompok	Target Capaian Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	4	5	6	9
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT					
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.214.791.411	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	presentase penyampaian dokumen perencanaan penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu		100%	11.485.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	2 Dokumen	8.889.000	APBD
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	2 Laporan	1.095.000	

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan	1 Laporan	1.500.000	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Presentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP		100%	3.318.602.811	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	ASN	27 Orang	3.311.510.811	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Laporan	1 Laporan	7.092.000	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Presentase Pelaksanaan Administrasi umum perangkat daerah		100%	377.373.500	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Komponen Instalasi Listrik	1 Paket	6.000.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Peralatan, Perlengkapan Kantor	1 Paket	105.950.000	

	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket Logistik Kantor		52.023.500	
	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan	Barang Cetak dan Pengandaan	1 Paket	63.400.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	6 Laporan	150.000.000	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase Pengadaan Barang Milik Perangkat Daerah		100%	576.509.100	
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Kendaraan	3 Unit	482.582.000	
	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Mebel	5 unit	93.927.100	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah		100%	546.641.000	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	92.850.000	

	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Laporan	28.291.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Yang Disediakan		1 Laporan	425.500.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik		100%	384.180.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang dipelihara dan di bayarkan Pajaknya	Kendaraan	1 Unit	40.000.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	kendaraan	6 Unit	135.830.000	
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Peralatan mesin	1 Unit	18.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Gedung kantor	1 Unit	190.350.000	Direnstra tdk ada

2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA				1.491.428.400	
	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana		100%	76.325.000	
	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah warga yang mendapatkan sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi yang dilakukan	warga negara	525 Orang	76.325.000	
	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana dilokasi rawan bencana		500 Orang	525.168.500	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Warga negara	60 Keluarga	44.920.000	

	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana	Jumlah Kawasan rawan bencana (Per jenis ancaman bencana) dan atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana		3 Kawasan	100.000.000	
	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana		50 Orang	100.698.500	
	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (Per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun		2 Dokumen	250.000.000	

	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan maklumat pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya		2 Laporan	29.550.000	Direnstra tdk ada
	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi, yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam		600 orang	712.384.900	
	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi	warga negara	650 orang	177.110.000	
	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	warga negara	400 orang	535.274.900	
	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	presentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana		6 Dokumen	177.550.000	

	Penyusunan Regulasi penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah	Dokumen	2 Dokumen	18.000.000	Di Renstra tdk ada
	Penguatan Kelembagaan Bencana	Jumlah dokumen tata Kelola kelembagaan bencana daerah	Dokumen	1 Dokumen	30.000.000	idem
	Kerjasama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana kabupaten/kota	Jumlah dokumen kerja sama antar Lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana	Dokumen	4 Dokumen	25.000.000	idem
	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia	Dokumen	1 Dokumen	60.000.000	
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penaggulangan Bencana	Warga negara	1 Laporan	21.750.000	
	Koordinasi Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pasca Bencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan	Warga negara	1 Kegiatan	22.800.000	
	TOTAL				6.706.219.811	

BAB IV

P E N U T U P

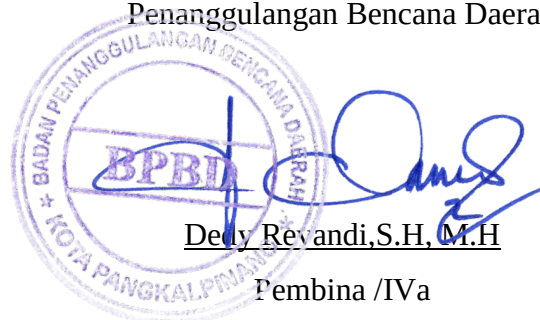
Proses mekanisme penyusunan Rencana Kerja Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang tahun 2025 ini melalui tahap–tahap yang dikoordinasikan dan dikomunikasikan dengan semua bidang yang ada di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang, sehingga materi telah terkoordinasikan secara optimal.

Penyusunan rancangan perubahan rencana kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang Tahun 2025 ini adalah tindak lanjut dari dokumen rencana kerja sebelum perubahan dan merupakan pejabaran rencana sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Dengan adanya RENJA Perubahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Pangkalpinang ini pun diharapkan dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi masyarakat kota Pangkalpinang.

Pangkalpinang, 01 Juli 2024

Kepala Pelaksana Badan

Penanggulangan Bencana Daerah



Dedy Revandi, S.H., M.H

Pembina /IVa

Nip.197609192002121005

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA PANGKAL PINANG TAHUN 2025

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH						6,706,218,811.00							0.00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						6,706,218,811.00							0.00	
	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						6,706,218,811.00							0.00	
1.	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENIKOTA	Indeks Kepuasan Pelayanan Internal Perangkat Daerah Nilai SAKIP Perangkat Daerah	95 Nilai 72,5 Nilai			90 Nilai 72 Nilai	5,214,790,411.00					Terpenuhinya penyampaian laporan kinerja dan keuangan perangkat daerah tepat waktu	95 Nilai 72.5 Nilai	0.00	
	1.05.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase penyampaian dokumen perencanaan, penganggaran dan kinerja perangkat daerah tepat waktu				100 %	11,484,000.00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				2 Dokumen	8,889,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	1,095,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	1,500,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya evaluasi kinerja perangkat daerah		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase tersusunnya laporan keuangan perangkat sesuai SAP	-			100 %	3,318,602,811.00			-	Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya administrasi keuangan Perangkat Daerah	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				27 Orang/bulan	3,311,510,811.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD				1 Laporan	7,092,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangunan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan / triwulanan / semesteran		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase penurunan tingkat pelanggaran disiplin ASN	-			100 %	0.00			-	-	-	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				27 Orang	0.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pelaksanaan administrasi umum perangkat daerah	-			100 %	377,373,500.00			-	-	Terlaksananya administrasi umum perangkat daerah	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	6,000,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Paket	105,950,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				1 Paket	52,023,500.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan bahan logistik kantor		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

[illegible]

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	425,500,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase barang milik perangkat daerah dalam kondisi baik	--			100 %	384,180,000.00			-	-	Terlaksananya pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	40,000,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, dan pajak kendaraan perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				6 Unit	135,830,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan Dinas Operasional atau lapangan		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	18,000,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terpenuhiya Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	190,350,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terpenuhiya pemeliharaan / rehabilitasi sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
2.	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Jumlah Dokumen Sistem Dasar Penanggulangan Bencana yang Tersusun Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	1800 Orang 18 Dokume n 6000 Orang 1500 Orang			6 Dokumen 6000 Orang 500 Orang 600 Orang	1,491,428,400.00					Terpenuhiya layanan informasi rawan bencana, pencegahan, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	550 Orang 6 Dokumen 6000 Orang 600 Orang	0.00	
	1.05.03.2.01	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Persentase jumlah penduduk di kawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	100 %			100 %	76,325,000.00			-	-	Meningkatnya layanan informasi rawan bencana di Kota Pangkalpinang	100 %	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.01.0007	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				525 Orang	76,325,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya Sosialisasi, komunikasi, informasi, dan edukasi rawan bencana		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang mendapatkan pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana di lokasi rawan bencana	1600 Orang			500 Orang	525,168,500.00			-	-	Meningkatnya layanan pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap bencana	600 Orang	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				60 Keluarga	44,920,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya pelatihan keluarga tanggap Bencana Alam		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0020	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana														
			Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana				3 Kawasan	100,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan pada kawasan-kawasan strategis kabupaten/kota		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0021	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana				100 Orang	100,698,500.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Meningkatnya kemampuan teknis dan manajerial TRC Tingkat Provinsi dalam melaksanakan penanganan awal darurat bencana		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0022	Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun				2 Dokumen	250,000,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Tersedianya dokumen rencana Kontinjensi yang dilegalisasi		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.02.0026	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah laporan layanan pusat pengendalian operasi (pusdalops) dengan Maktumat Pelayanan yang sah dan legal sesuai dengan jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya				2 laporan	29,550,000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Tersedianya dokumen hasil pengendalian operasi dan penyediaan sarana prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah korban bencana berhasil dicari ditolong dan dievakuasi yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana serta jumlah kasus KLB yang ditangani kurang dari 24 jam	1800 Orang			600 Orang	712,384,900.00			-	-	Meningkatnya layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	550 Orang	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGULANGAN JAWAB
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				0 Orang	177.110.000.00	-	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	Terlaksananya upaya untuk menemukan, menolong, maupun memindahkan kkorban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.03.0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				400 Orang	535.274.900.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terdistribusinya logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase pencapaian Tata Kelola Pelaksanaan Penanganan Pasca Bencana	18 Dokumen			6 Dokumen	177.550.000.00			-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Meningkatnya penataan sistem dasar penanggulangan bencana	6 Dokumen	0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0001	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Regulasi pendukung penyelenggaraan Penanggulangan bencana di daerah				1 Dokumen	18.000.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Tersedianya Regulasi pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0002	Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah				1 Dokumen	30.000.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Tersedianya dokumen tata kelola Kelembagaan Bencana Daerah		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0003	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam penanggulangan Bencana				4 Dokumen	25.000.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Terlaksananya kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0004	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan														
			Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia				1 Dokumen	60.000.000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemeri ntahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Tersedianya Data dan Informasi Kebencanaan		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2025	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.05.03.2.04.0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana				1 Laporan	21,750,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemert nahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Tertlaksananya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraa n penanggulanga n Bencana		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
	1.05.03.2.04.0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalika n				1 Kegiatan	22,800,000.00	Kota Pangkal Pinang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Pembangu nan Pemert nahan Peningkata n Kualitas Tata Ruang Wilayah Berbasis Lingkungan	Tersedia nny Dokumen penangan an pasca Bencana kabupate n/kota melalui pengkajaa n kebutuhan pasca bencana (JITU PASNA) rencana rehabilitasi dan Rekontruksi pasca bencana (R3P)		0.00	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
			J U M L A H					6,706,218,811.00							0.00	